

**KOALISI DOWN TO ZERO (DTZ) DALAM MENGATASI KASUS
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK-ANAK DI
THAILAND 2016-2020**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AKBAR HERLAMBAANG FAUZI

18323100

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KOALISI DOWN TO ZERO (DTZ) DALAM MENGATASI KASUS
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK-ANAK DI
THAILAND 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AKBAR HERLAMBAANG FAUZI

18323100

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KOALISI DOWN TO ZERO (DTZ) DALAM MENGATASI KASUS
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK-ANAK DI
THAILAND 2016-2020**

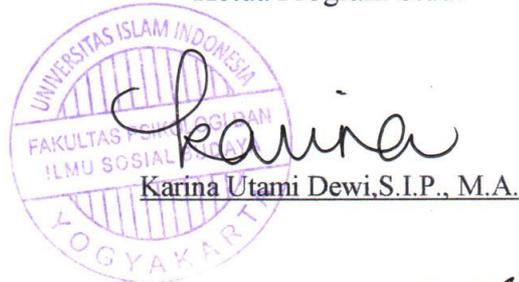
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

15 Agustus 2023,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote is partially visible, showing the number '10000' and the text 'SERBUPERSAMAAN' and 'REPUBLIK INDONESIA'. The signature is written in a cursive style.

AKBAR HERLAMBAANG FAUZI

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
15.1 Latar Belakang	1
15.2 Rumusan Masalah	5
15.3 Tujuan Penelitian	5
15.4 Cakupan penelitian	5
15.5 Tinjauan Pustaka	6
15.6 Kerangka Pemikiran	8
1.8 Metode Penelitian	13
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	13
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	13
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	13
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONDISI DOMESTIK DAN KOALISI NGO “DOWN TO ZERO”	15
2.1. Perkembangan Kondisi Eksploitasi Seksual Anak di Thailand	15
2.2. Koalisi NGO	21
BAB III UPAYA KOALISI DOWN TO ZERO DALAM MENGATASI KASUS EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TAHUN 2016-2020	24
3.1. Advokasi	24
3.2. Lobbying	31
3.3. Kampanye	37
BAB IV PENUTUP	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2 Rekomendasi	44
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Korban ESKA di Thailand	1
---	----------

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Persentase Pelaku Eksploitasi di Thailand Tahun 2018.....	15
Diagram 2.2 Arus Destinasi Korban Eksploitasi.....	16
Diagram 2.3 Skema Kerjasama Down to Zero dengan sektor-sektor Privat	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerjasama antara Private Sector dan Down to Zero Alliance..	35
Gambar 3.2 Poster berupa Himbauan yang disertakan pada Beberapa Brosur, dan Media Komunikasi.....	40
Gambar 3.3 Tampak Hasil Fotografi Van Der Velden di Tahun 2018.....	42

DAFTAR SINGKATAN

ADRA	: <i>Adventist Development and Relief Agency</i>
CACs	: <i>Children Advocacy Center</i>
CBCPM	: <i>Child Member of Community based Child Protection Mechanism</i>
CRC	: <i>Convention of the right of the children</i>
CSAM	: <i>Child Sexual Abuse Material</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DCY	: <i>Department Child and Youth</i>
DSI	: <i>Department of Special Investigation</i>
DTZ	: <i>Down to Zero</i>
ECPAT	: <i>End Child Prostitution, Child Pornography, End Trafficking of Children for Sexual Purpose</i>
ESKA	: <i>Eksplorasi Seksual Komersial Anak</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
ICCO	: <i>Interchurch Coordination Comittee Development Aid</i>
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
IMS	: <i>Infeksi Menular Seksual</i>
LEA	: <i>Law Enforcement Agencies</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NGOWGB	: <i>NGO Working Group on the</i>
OCSE	: <i>Online Children Sexual</i>
SEC	: <i>Sexual Exploitation Children</i>
TICAC	: <i>the Royal Thai Police's Thailand Internet Crimes Against Children</i>
TWA	: <i>Thailand Web Master Association</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNIAP	: <i>United Nation Inter-Agency Project on Human Trafficking</i>
UNODC	: <i>United Nation Office on Drugs and Crime</i>
WTD	: <i>We Think Digital</i>
YSILC	: <i>Youth Services Innovation and Leadership Camp</i>

ABSTRAK

Thailand merupakan salah satu negara dengan tingkat perdagangan manusia yang relatif cukup tinggi dan angka pertumbuhannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor pariwisata menjadi permasalahan besar. Pasalnya, sektor tersebut berkontribusi pada eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan masa depan anak-anak dibentuklah *Down to Zero Alliance* yang merupakan kolaborasi antara beberapa non- Governmental organization. Penelitian ini berfokus pada analisa upaya yang dilakukan koalisi DtZ dalam mengatasi kasus ESKA di Thailand. Ditinjau melalui teori *NGO Coalition* yang dikemukakan oleh Helen Yanacopulos dalam tulisannya yang berjudul *The Strategies that bind: NGO coalitions and their influence*. Dalam berkoalisi menurut Hellen Yanacopulos ini memiliki 3 strategi utama yaitu advokasi, lobi dan kampanye. Advoksi yang dilakukan DtZ salah satunya membuat penampungan bagi para korban untuk mengurangi rasa trauma, psikis dan lainnya yang di sebut dengan program Children Advocacy Center (CACs). Selanjutnya melobi pihak-pihak terkait seperti perusahaan-perusahaan swasta untuk bergabung dengan program *The Code*. Kampanye juga dilakukan untuk menyebarkan isu ini seperti dengan membuat pameran foto para korban dan diterbitkan di media besar salah satunya *The guardiant*.

Kata kunci: eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), Thailand, *NGO coalition, Down to Zero*.

ABSTRACT

Thailand is country with a relatively high level of human trafficking and its growth rate had been increased from year to year. The tourism sector became serious problem. Because this sector contributes to the commercial sexual exploitation of children (CSEC). To encounter and save children's future, Down to Zero Alliance was formed as collaboration between Non-Governmental Organization. The research focused on analyzing the efforts of coalition in addressing Commercial Sexual Exploitation in Thailand. It is reviewed through her Yanacopulos' writing entitled Strategies that bind: NGO coalitions and their influence. In eliminating, Helen has three key strategies: advocacy, lobby, and campaign. Advocacy practicing in creating them shelter for victims to reduce trauma, psychology that called Children Advocacy Center (CACs). Furthermore, lobbying several relevant paryies like provate corporarions to join The Code program. Campaign was conducted in spreading issue by creating exhibition photos of victims and published in major media like The Guardian.

Keyword: *commercial sexual exploitation of children, Thailand, NGO coalition, Down to Zero.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan sebuah kejahatan serius yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Tipu muslihat pelaku biasanya dengan bujuk rayu, pemaksaan sekaligus mengancam serta penculikan dalam meluncurkan aksinya. Tindakan ini jelas mengancam keamanan manusia dan juga Hak Asasi Manusia bahwa hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Thailand merupakan salah satu negara dengan tingkat perdagangan manusia yang relatif cukup tinggi (ECPAT, 2015). Angka pertumbuhannya mengindikasikan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Korban ESKA di Thailand



Sumber: (UNIAP, 2010)

Dibukanya sektor pariwisata Thailand sejak 1980-an memberikan konsekuensi yang tidak tertahankan. Munculnya *Commercial Sexual Exploitation of The Children* menjadi fenomena yang tak terkendalikan (Lestari, Mulyani, Wiranata, 2015). Kejadian ini memposisikan anak-anak sebagai objek seksual oleh wisatawan asing yang sengaja melakukan perjalanan ke Thailand dengan tujuan seksual. Parahnya, tindakan ini menjadi lumrah dengan adanya stigma bahwa Thailand adalah negara *Child Sex Tourism* terbesar di dunia.

Sektor Pariwisata Thailand memang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi negara. Tercatat meningkatnya GDP di Thailand yang mencapai 10% dan relatif stabil dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Thailand adalah salah satu negara di Asia Pasifik yang banyak dikunjungi oleh turis luar. Pada 2015 total turis yang datang ke Bangkok ialah sekitar 21.9 juta orang (Peltier, 2016). Di balik gemerlapnya angka tinggi tersebut, perempuan di bawah umur menjadi pekerja seks komersial. Perempuan tersebut dieksploitasi dan dipekerjakandengan gaji yang rendah. Faktor yang mendasarinya adalah permintaan seksual anak yang tinggi oleh wisatawan asing, yang melakukan kunjungan ke Thailand untuk wisata seks. Hal ini mendorong Menteri Pariwisata Thailand, Kobkarn Wattanavrangkul melontarkan *statement*: “*We want Thailand to be about quality tourism. We Want the sex industry gone*” (Fartiannur, 2018).

Laju pertumbuhan ekonomi Thailand mengantarnya ke dalam satu permasalahan besar yaitu eksploitasi seks komersial anak (ESKA). Eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah tindakan yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial bagi para turis yang datang ke Thailand. ESKA juga tidak hanya mencakup prostitusi saja, tetapi juga pornografi, perdagangan anak dan eksploitasi anak untuk tujuan seksual dan terjadinya ESKA ini merupakan sebuah pelanggaran berat

terhadap hak-hak anak. Ada 1,8 juta yang dieksploitasi untuk melakukan prostitusi dan pornografi di seluruh dunia dan perdagangan anak ini adalah salah satu sebuah industri ilegal yang dapat menghasilkan miliaran dolar Amerika Serikat (Widhi, 2018). Oleh karena itu, ESKA ini terus meluas sehingga hal ini menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Korban-korban yang dijadikan sebagai budak seks untuk para turis ini selain yang memang masyarakat Thailand itu sendiri banyak juga korban dari hasil perdagangan manusia yang berasal dari negara luar (Fartiannur, 2018).

Thailand merupakan negara tujuan dan transit dalam terjadinya kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. Khususnya kota Bangkok yang sangat padat merupakan pusat transit yang populer bagi para pelaku perdagangan manusia. Wilayah-wilayah perbatasan Thailand juga menjadi jalur terjadinya perdagangan manusia, mereka menggunakan Pelabuhan dan jalur laut yang sulit diawasi oleh pihak berwenang. Selain itu, perdagangan manusia yang terjadi juga melibatkan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Thailand, seperti Laos dan Myanmar bahkan terkenal dengan sebutan “*The Golden Triangle*” dimana ketiga titik ini sangat rawan terjadinya proses perdagangan manusia. (McGeough, 2022)

ESKA yang terjadi di Thailand ini bukanlah sesuatu tindakan yang legal secara hukum Thailand maupun hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Thailand sebelumnya, dari Convention of the Right of the Children (CRC) yang diratifikasi dari tahun 1992. Badan independen di bawah UN yang ditugaskan untuk mengikuti penerapan kebijakan CRC menyatakan bahwa Thailand sudah gagal dalam melindungi hak-hak anak karena telah membiarkan praktik ESKA terus berlangsung di negara sendiri. Hingga pada akhirnya CRC ini merekomendasikan untuk bekerja sama dengan NGO untuk membantu Thailand dalam memenuhi hak-hak anak sesuai dengan CRC. Karena tingkat perdagangan manusia di Thailand ini sangat tinggi, untuk mengatasi atau

mengurangi kejahatan manusia ini negara Thailand sendiri sudah melakukan beberapa upaya, seperti membuat kebijakan tentang perdagangan manusia, menjalin Kerjasama baik bilateral maupun multilateral, pembuatan perjanjian dan Kerjasama dengan badan-badan internasional yang memiliki fokus untuk memberantas perdagangan manusia, seperti ILO, UNIAP dan ECPAT.

ECPAT kepanjangan dari *End Child Prostitution, Child Pornography and The Trafficking of Children for Sexual Purpose* sebagai organisasi internasional yang memiliki *concern* dalam menangani eksploitasi terhadap anak. Organisasi ini terdiri dari masyarakat sipil yang bersolidaritas untuk mengakhiri permasalahan seperti prostitusi, penjualan dan perdagangan anak dalam sektor pariwisata demi tujuan komersial. ECPAT bekerja mendorong komunitas di seluruh dunia untuk memastikan anak-anak dapat menikmati hak, kebebasan, dan aman dari eksploitasi sosial (ECPAT International Strategic Network, 2018.)

Salah satu langkah yang dilakukan oleh ECPAT adalah melakukan advokasi secara terus menerus dalam beberapa sektor sehingga perbincangan mengenai SEC (*Sexual exploitation Children*) mendapatkan ruang dalam diskursus kebijakan strategi dan rencana. Sehingga pada Desember 2015, KUHP Thailand mengesahkan amandemen undang-undang yang mendefinisikan dan mengkriminal pelecehan seksual anak (ECPAT International Strategic Network, 2018).

ECPAT bersama empat NGO lainnya Terre des Hommes Netherlands (lead), End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), Free a Girl, ICCO-Cooperation, Plan International Netherlands tergabung dalam koalisi yang disebut sebagai *Down to Zero*. Koalisi disatukan berdasarkan satu isu yang sama mengenai eksploitasi seksual anak. Koalisi ini berdiri sejak 2016 dan berakhir

pada tahun 2020. Fokus ini berada dalam 2 wilayah regional yaitu Asia dan Amerika Latin (Down to Zero, 2019).

Maka, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh koalisi ini banyak meninggalkan jejak dan hasil dalam menangani permasalahan eksploitasi seksual seperti membangun hubungan dengan sektor pariwisata. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih jauh langkah-langkah yang dilakukan koalisi *Down to Zero* secara khusus dalam isu ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya koalisi *Down to Zero* dalam mengatasi kasus eksploitasi seks komersial terhadap anak-anak di Thailand pada tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jauh kinerja koalisi *Down to Zero* dalam menangani kasuseksploitasi seks komersial terhadap anak-anak pada tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dan praktik-praktik yang dilakukan selama hubungan ini dibangun dalam rentang waktu 2016-2020.

1.4 Cakupan penelitian

Batasan penelitian ini mengambil rentang waktu antara tahun 2016-2020, dikarenakan koalisi ini menjalin hubungan hanya lima tahun. Awalnya hubungan ini diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Belanda yang kemudian mengajak beberapa NGO sehingga terbentuknya *Down to Zero Alliance*. Budget koalisi ini ditaksir mencapai 15 juta *euro* (Down to Zero, 2019). Kerja sama ini secara umum terbagi pada beberapa poin penting seperti advokasi, lobby, kampanye dan penanganan korban. Untuk memperluas advokasi tersebut, koalisi ini menjalin hubungan dengan *stakeholders* penting pada level

domestik negara yang bersangkutan seperti pemerintah, tokoh masyarakat, petinggi perusahaan swasta, dan pemangku kebijakan.

Maka, peneliti mengambil rentang waktu 2016-2020 menganggap ini sebuah langkah yang lebih tepat untuk membaca dan menganalisa secara jelas padapraksis-praksis yang sudah diupayakan khususnya di negara Thailand yang menjadialah satu target negara koalisi ini dijalankan di regional Asia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Thailand menjadi negara paling masyhur dalam perdagangan manusia, prostitusi anak dan *Child Sex Tourism*. Emily Caldwell, seorang peneliti Southern Oregon University berusaha mengungkap hal-hal yang menjadi faktor penyebab lahirnya industri *Child Sex Tourism*. Ia menduga adanya marginalisasi sistemik yang mengharuskan anak-anak untuk turut berpartisipasi dan menjerumuskan mereka ke dalam industri ini. Salah satunya, Thailand belum memiliki perangkat undang-undang yang efektif. Dalam hal ini khususnya penegakan implementasi hukum yang dibuat. Selain pariwisata seksual ini sudah mengakar, dan penegak hukum yang korupsi dan kolusi masih menjadi struktur penghalang sendiri. Di samping itu, kejahatan ini sudah menggunakan teknologi modern dalam melancarkan aksinya. Akar-akar penyebab kejahatan ini muncul dari segmen-segmen kompleks seperti politik, ekonomi, budaya, dan eksternal (globalisasi) (Caldwell, 2015.).

Selaras dengan Caldwell, Carmen Lau (2008) menganggap eksploitasi ini sebagai fenomena perbudakan kontemporer. Ia menyayangkan bahwa Thailand tidak cukup serius menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini terlihat bahwa negaranya lebih berorientasi terhadap turis negara untuk menghasilkan sumber pendapatan sehingga mereka cenderung menutup mata pada industri seks dan membiarkan eksploitasi seksual anak-

anak terus berlangsung. Kesadaran inilah apa yang disebut oleh Lau sebagai faktor ideologis yang semata-mata menjauhkannya dari realitas sosial yang terjadi.

Dalam jurnal ini juga menekankan bahwa pariwisata yang menjadi salah satu aspek penting Thailand dalam meningkatkan perekonomiannya, penting untuk diketahui bahwa pariwisata itu sendiri bukanlah penyebab langsung dari terjadinya pariwisata. Tetapi memang, memberikan peluang bagi para wisatawan untuk melakukan pariwisata seks terhadap anak ini. Para pelaku ESKA dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pelecehan situasional dan pelaku preferensial. Pelecehan situasional yaitu para pelaku yang tidak sengaja atau tidak merencanakan untuk menjadikan anak sebagai objek seksualnya karena tidak memiliki minat seksual terhadap anak-anak, sedangkan pelaku preferensial adalah pelaku yang secara sadar menjadikan anak sebagai objek seksualnya, pelaku ini dikenal dengan sebutan pedofil (Lau, 2008).

Berbeda dengan peneliti sebelumnya, Rafferty (2007) mencoba memberikan penekanan pada tesis penelitiannya bahwa faktor terbesar adanya eksploitasi seksual terhadap anak adalah permasalahan ekonomi. Ia mencoba memetakan bahwa yang cenderung menjadi korban adalah perempuan yang tinggal di pedesaan dengan ekonomi rendah dan akses pendidikan yang belum memadai. Perempuan di Thailand cenderung menganggap pendidikan hanya sebagai aktivitas pemborosan dan investasi bodong. Selain itu, stereotip perempuan menjadi selir dalam sejarah kerajaan mengkonstruksi pemikiran bahwa perempuan diciptakan hanya untuk melayani lelaki. Kesempatan inilah yang kemudian diafirmasi oleh pelaku-pelaku kejahatan terselubung ini.

Selain dari jurnal-jurnal juga, penelitian ini mengambil dari buku-buku, salah satunya buku yang berjudul *Survey of Sexual and Reproductive Health of Sex Workers in*

Thailand, yang ditulis oleh Phillip Guest, Aree Prohmmo, Jhon Bryant, Surang Janyam, Dusita Pheungsamran. Dalam buku ini selain menjelaskan bagaimana proses terbentuknya pekerjaan seksual, tetapi juga, menjelaskan aspek kesehatan bagi para pekerja seksual. Dijelaskan bahwa di Thailand telah terbentuk kepercayaan atau sebuah mitos bahwa bekerja di industri seks adalah sebuah jalan alternatif ketika sudah putus asa untuk mencari pekerjaan yang layak. Dengan melakukan survey, dalam buku ini disebutkan bahwa para pekerja seks kebanyakan melakukan pekerjaan ini pertama kali antara umur 15-24 tahun, sisanya banyak yang terjerumus ketika mengalami kegagalan rumah tangga. Selain itu juga, dalam survey ini membuktikan bahwa pengetahuan para pekerja seks terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) sangatlah minim. Para pekerja seks ini banyak yang tidak mengetahui IMS, kebanyakan yang mereka ketahui tentang IMS ini hanya penyakit HIV (Guest & Bryant, 2007).

Beberapa penelitian ini menjadi penunjang dalam melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak-anak adalah fenomena yang riil dan sudah lama terjadi. Maka penelitian ini terletak pada sisi analisis kinerja koalisi *Down to Zero* dalam membantu menyelesaikan permasalahan eksploitasi seksual terhadap anak-anak di Thailand.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep pengaruh koalisi *Non-Government Organization* dalam mendukung terbentuknya kebijakan yang digagas (Yanacopulos, 2005) oleh Helen Yanacopulos sebagai alat analisis dalam melihat fenomena penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

NGO adalah organisasi strategis yang mempunyai perangkat dan kerangka kerja yang jelas. Mereka disatukan dengan nilai-nilai bersama dan pada umumnya berfokus pada isu-isu tertentu. Keck dan Sikkink menganggap organisasi tersebut menjadi sangat penting dalam menyebarkan norma-norma internasional seperti hak asasi manusia. Secara signifikan berperan menghubungkan antar aktor dalam negara, masyarakat sipil dan bahkan organisasi internasional.

Namun, Yanacopulos (2005) beranggapan bahwa NGO sering bekerja sama untuk mencapai tujuannya dengan membentuk koalisi dalam mengumpulkan sumber daya dan memperkuat suara kolektif mereka. Baginya, koalisi didefinisikan sebagai sekumpulan organisasi yang disatukan dengan nilai-nilai yang sama dan tujuan-tujuan yang sama.

Baginya, koalisi ini dinilai lebih efektif. Hal ini dilihat dari bagaimana organisasi tersebut memanfaatkan sumber daya dan keahlian kolektif untuk mempengaruhi keputusan kebijakan. Hubungan yang terbangun menjadi lebih kuat dengan adanya pertukaran informasi. Koalisi menciptakan satu nilai dan komitmen yang lebih besar. Tindakan tersebut memungkinkan meningkatkan legitimasi dan kekuasaan dengan berbicara satu suara.

Keterkaitan antar organisasi memberikan empat keuntungan bagi pengelolaan saling ketergantungan lingkungan. Pertama, mereka memberikan informasi tentang kegiatan organisasi yang mungkin menimpa atau mempengaruhi organisasi fokus. Kedua, mereka menyediakan saluran untuk mengkomunikasikan informasi ke organisasi lain di mana organisasi fokus bergantung. Ketiga, paparan terhadap organisasi lain memberikan langkah awal yang penting dalam memperoleh komitmen dukungan dari pelaku penting

dalam lingkungan. Dan keempat, keterkaitan antar organisasi memiliki nilai tertentu untuk melegitimasi fokus organisasi. Ia juga mengidentifikasi adanya strategi utama yang digunakan oleh berkoalisi ini yaitu: lobi, advokasi, dan kampanye. (Yanacopulos, 2005, pp. 93-100)

Pertama, dalam melangsungkan aksinya, tindakan NGO ini diawali dengan advokasi sebagai jembatan untuk mempengaruhi perubahan di tingkat politik. Salah satu sumber suara NGO adalah penyampaian suara dari hubungannya dengan jaringan akar rumput. Fungsi ini memberikan NGO legitimasi dalam proses tindakannya yang dianggap penting sebagai sumber terekam dalam pernyataan yang dibuatnya. Pada dasarnya, advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, pemberian dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Serta upaya tersebut dibentuk untuk mempengaruhi kebijakan publik dan opini publik. (Yanacopulos, 2005, p. 100)

Kedua, selanjutnya adalah lobi yaitu melibatkan keterlibatan langsung dengan pembuat kebijakan dan pembuat keputusan untuk mempengaruhi hasil kebijakan. Secara sederhana, mereka yang ingin dipengaruhi. Lobi adalah proses yang jauh lebih bertarget, membutuhkan seni persuasi, pengetahuan ahli, dan keterampilan negosiasi. Ada dua aspek melakukan lobi dalam pandangan politik klasik yaitu memposisikan dirinya sebagai reformis (bekerja dalam sistem untuk merubahnya) atau revolusioner (merubah dan menyingkirkan sistem secara seluruhnya). Tingkatbekerja ini merupakan aspek penting berdasarkan kesepakatan yang harus dicapai dalam koalisi tersebut dan tergantung pendekatan yang dianggap lebih efektif. (Yanacopulos, 2005, p. 103)

Ketiga, kampanye membutuhkan pesan dan tujuan yang jelas. Tujuannya untuk memobilisasi pendukung dengan penggunaan media yang beragam dalam menekan pembuat keputusan. Mempengaruhi kebijakan menjadi faktor yang paling penting dan utama. Selain itu, kampanye melibatkan penggunaan berbagai taktik seperti protes atau

kampanye media, untuk meningkatkan kesadaran dan menghasilkan dukungan untuk tujuan tertentu. Selain itu, penggunaan koalisi menjadikan kampanye lebih terstruktur dan terkoordinasi secara multi-level. Koordinasi dalam kubu koalisi menjadi keterampilan yang penting dalam mengelola proses multi-level ini berlangsung. Sehingga pilihan tersebut akan mengarahkan pada strategi eksplorasi koalisi ini mempengaruhi aktor perubahan. (Yanacopulos, 2005, p. 105)

Hal ini seperti NGOWGWB yaitu kepanjangan dari NGO *working Group on The World Bank* yaitu sekelompok NGO ini bertugas untuk mengadvokasikan permasalahan dengan World Bank. Grup ini merupakan forum global yang mempunyai akses untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan petinggi-petinggi *World Bank*. Hal ini tidak mungkin dicapai dalam forum berskala nasional. Koalisi ini diberikan akses yang kredibel dari pihak *World Bank* secara langsung. Begitu juga dengan dana koalisi ini berasal dari *World Bank* secara langsung dan juga dari anggota NGO itu sendiri.

1.7 Argumen Sementara

Sebuah aliansi NGO yang bernama *Down to Zero Alliance* mencoba sebuah inisiasi dalam penyelesaian kasus eksploitasi komersial terhadap anak-anak yang berfokus pada wilayah Asia dan Amerika Latin. Thailand adalah salah satu negarayang menjadi tujuan *down to zero*. Aliansi ini bekerja sama dengan beberapa aktor khususnya pemerintah dan perusahaan swasta yang berada dalam lingkup sektor pariwisata melalui strategi advokasi lobi dan kampanye.

Dalam ranah praksisnya, koalisi ini menargetkan pemilik sektor pariwisata khususnya dan menjadi prioritas utama yang kemudian didudukkan menjadi partner dalam menuntaskan misi ini. Advokasi ini berupa jalinan kerjasama yang berupa pemberian

pemahaman mengenai isu komersial anak sekaligus menjadi *watchdog* yang mengawasi dan mengantisipasi agenda ini akan terjadi.

Lobbying ini berupa perjanjian yang melekat dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Taktik ini mengincar pada tergabungnya perusahaan sektor pariwisata tersebut dalam The Code sebagai tujuan objektivitasnya. Dengan tergabungnya pada ini, jejaring akan memberikan dukungan, panduan, contoh praktik, dan alat-alat bantu dalam tataran penyelesaiannya. Di lain sisi, perusahaan mendapatkan timbal balik berupa penyelesaian tugas perusahaan berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*). Hal ini semacam bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dampaknya pada sosial dan lingkungan.

Langkah tersebut terlihat bagaimana The Code memberikan stimulus pada proses penyadaran khalayak termasuk wisatawan asing. Mengingat sektor ini memberikan sumbangan terbesar pada isu kejahatan eksploitasi tersebut. Pihak- pihak pemangku sektor pariwisata kemudian membuat narasi dan visual yang ditempelkan pada brosur-brosur, kamar hotel, restoran, dan lain-lain. Kampanye iniapa yang disebut oleh Helen sebagai komunikasi multi-level. Beberapa banyak hal contoh lain seperti festival film pendek oleh DtZ, dan pameran fotografi yang bekerja sama dengan majalah *Vrouw*.

Dengan itu, The Code semacam menjadi stakeholders atau kunci berperan dalam kampanye yang kemudian menggerakkan seluruh elemen untuk turut andil berkontribusi pada cikal bakal penyelesaian isu komersial. Pasalnya, karyawan yang tergabung dalam perusahaan tersebut dilatih untuk paham dan mengantisipasi. Hal ini terhitung sebagai selubung nilai-nilai kampanye untuk memperluas pemahaman ini kepada khalayak umum.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penulisan kualitatif, dimanadengan menggunakan metode ini diharapkan bisa memberikan hasil yang lebih optimal dan realistis. Menggunakan metode ini juga dapat membuat pembahasan lebih bersifat deskriptif sehingga pembahasan terhadap isu bisa lebih jelas dan terarah.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Koalisi *Down to Zero* pada penanggulangan eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak yang terus terjadi di negara Thailand, dan Thailand sebagai negara dalam konteks permasalahan ini. sedangkan yang menjadi objek dari penelitiannya adalah upaya koalisi *Down to Zero* dalam penyelesaian eksploitasi seksual komersial anak diThailand 2016-2020

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengambil data, penelitian ini memperoleh dari data sekunder. Adapun yang termasuk ke dalam sumber sekunder yaitu seperti media tertulis, mencakup: buku teks akademis, publikasi, surat kabar harian, ataupun laporan- laporan tahunan (*annual report*) yang secara resmi dipublikasikan oleh media organisasi terkait. Sumber sekunder yang dipilih juga berdasarkan pada reputasi dan kredibilitas media atau penerbit serta kaitannya dengan topik yang diteliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan suatu tahapan yang mencakup perencanaan atau

langkah dan dimulai dari penelitian terdahulu yang berkaitan, dan interpretasi penelitian ataupun laporan penelitian. Prosedur ini dianggap penting karena sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam bab sistematika penulisan ini akan dijelaskan bagaimana tahapan dan isi dari bab-bab penelitian dengan harapan agar lebih mudah memahami penelitian dan pembahasan ini, sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

a. Bab I: Pendahuluan

Pada bagian ini, penulis menerangkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

b. Bab II: Konteks

Pada bagian kedua ini penulis akan membahas mengenai lebih dalam tentang kondisi domestik Thailand dan Koalisi *Down to Zero*.

c. Bab III: Analisis

Pada bagian bab ketiga ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yaitu hasil kerja sama antara Koalisi *Down to Zero* dan pemerintah Thailand dengan pendekatan *The strategies that bind: NGO coalitions and their influence*.

d. Bab IV: Kesimpulan

Dalam bab yang keempat ini berisi tentang uraian kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

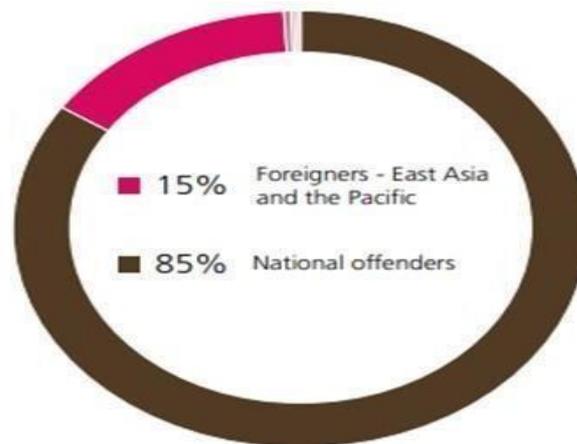
BAB II

KONDISI DOMESTIK DAN KOALISI NGO “DOWN TO ZERO”

2.1. Perkembangan Kondisi Eksploitasi Seksual Anak di Thailand

Menurut Laporan yang diunggah oleh UNODC (Vereinte Nationen 2018), perempuan dan anak-anak terdeteksi sebagai korban yang sering diculik dan diperdagangkan. Jumlah ini lebih banyak terjadi khususnya di negara daerah Mekong khususnya Thailand. Bentuk eksploitasi ini dapat bermacam-macam; eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bahkan untuk mengemis paksa. Anehnya, aktor terbesar yang menjadi dalang dibalik ini justru datang dengan kewarganegaraan yang sama, sebaliknya sekitar 15% orang asing menjadi aktor dibalik aksi tersebut (Vereinte Nationen, 2018).

Diagram 2.1 Persentase Pelaku Eksploitasi di Thailand Tahun 2018



Source: UNODC elaboration of national data.

Sumber : Vereinte Nationen (2018)

Arus dagang ini dipetakan oleh UNODC (2016), yang kemudian memberikan titik terang bahwa negara Makmur menjadi sasaran perdagangan. Begitupun dengan Thailand yang menjadi tujuan perdagangan bagi negara-negara seperti Kamboja, Republik Demokrasi Laos, Myanmar dan Vietnam.

Diagram 2.2 Arus Destinasi Korban Eksploitasi



Sumber: Vereinte Natione (2018)

Aktivitas eksploitasi seksual ini sudah sedemikian mewabah dan kemudian memperluas langkah kerja taktisnya dengan dibantu dukungan proliferasi teknologi-teknologi khususnya dukungan jaringan internet. Hal ini dapat dilihat dari Langkah yang diambil oleh *The ministry of social development and Human security's department children and youth*, kemudian mengeluarkan mandat yang diberi nama *the Strategy and Plan for the Protection and Solution of Violence against Children and Youth (2015-2021)* (Naebklang, 2015).

Dengan bantuan NGO, komite ini memberikan kontribusi pada langkah- langkah praksis dengan menyediakan layanan medis, psikologis dan hukum seperti reintegrasi, pemulihan fisik dan psikologis dan bantuan layanan sosial (Naebklang, 2015).

Begitupun hal-hal lain; mengembangkan mekanisme dan prosedur untuk identifikasi dini korban anak; memastikan bahwa rekaman video kesaksian oleh korban anak atau saksi pelanggaran selalu diterima sebagai bukti; memperkuat kapasitas instansi pemerintah untuk memastikan dan mengkoordinasikan pendampingan dan dukungan terhadap anak korban.

Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Thailand yang melakukan kerjasama dengan NGO 'INHOPE' yaitu jaringan kolaboratif aktif dari 44 hotline di 38 negara di seluruh dunia yang menangani konten ilegal online dan berkomitmen untuk membasmi dan memberantas materi pelecehan seksual anak di Internet. Kemudian INHOPE meluncurkan 'SaiDek 1387' *call center* sebagai layanan pengaduan dan penanganan awal kepada masyarakat yang mengalami eksploitasi ini (de Hommel, 2019).

Langkah ini dilindungi undang-undang yang bersangkutan informasi dan teknologi. Dengan itu pengadilan mempunyai wewenang untuk memblokir konten-konten bertentangan dengan moral privasi anak-anak. Sejak undang-undang itu disahkan pengadilan hanya sibuk memberantas opini politik daripada berurusan dengan konten ilegal lainnya (Naebklang, 2015).

Tak hanya itu, kondisi anak-anak di Thailand menjadi sangat terancam dengan adanya Tindakan-tindakan media Thailand yang justru melanggar hak privasi anak dengan mengungkapkan identitas anak yang menjadi korban pelecehan dan detail informasi-informasi yang bersangkutan seperti nama, sekolah, dan alamat. Sebenarnya ada Undang-Undang Perlindungan yang menjaga reputasi dan keamanan ini pada pasal 27 ayat 50. Sayangnya hal ini tidak diindahkan (Naebklang, 2015).

Fenomena ini menjadikan Thailand teridentifikasi sebagai negara dengan gambar pelecehan seksual anak pada peringkat ke 6 dari 15 negara pada tahun 2019 dan negara ke

14 dari 15 yang menyediakan situs web pelecehan anak teratas. Terutama selama dekade terakhir (Hawke and Raphael, 2016), Internet telah memfasilitasi perubahan pola anak eksploitasi seksual. Saat ini ada situs Internet yang menawarkan gambar pelecehan anak, streaming langsung pelecehan seksual anak, dan alat untuk mengatur wisata seks anak, serta akses ke informasi pada jaringan potensi korban pelecehan seksual anak. Internet memasok potensi dan mengulangi pelaku seks anak dengan kesempatan untuk mengatur perjalanan dan merencanakan kontak untuk mengakhiri (penyalahgunaan langsung). Pelaku seks anak menyalahgunakan Internet untuk merawat korban mereka dan terhubung dengan calon fasilitator (misalnya keluarga atau anggota masyarakat) dari jauh. Internet memberi pelaku ini menyembunyikan identitasnya sehingga mereka dapat menyembunyikan identitas aslinya dan mengakses anak materi eksploitasi seksual tanpa rasa takut yang signifikan akan terdeteksi (Hawke and Raphael, 2016).

Kedudukan ini tak lain didorong oleh faktor pariwisata global yang sedang digencarkan oleh pemerintah Thailand. Bisa dilihat dengan lonjakan peningkatan 6% pada jumlah wisatawan yang sedang melakukan perjalanannya ke Thailand baik itu wisatawan regional dan internasional. Angka ini ditaksir mencapai 104 juta jiwa. Pariwisata global sekarang sudah banyak didukung oleh faktor-faktor yang dikembangkan oleh aktor-aktor kelas menengah. Perkembangan ini dapat dilihat seperti pengurangan biaya perjalanan internasional, proliferasi internet dan teknologi informasi. Perjalanan bisnis dan gaya hidup ekspatriat juga meningkat dengan dukungan-dukungan seperti pelonggaran pembatasan visa yang bisa dimaksimalkan untuk kemungkinan tinggal dan bekerja. Selain itu diversifikasi industri perjalanan dan pariwisata yang dimodali fitur perjalanan hemat hingga perjalanan mewah. Dengan berbagai macam pilihan seperti ekowisata, petualangan, dan bahkan voluntourism menjadi pilihan dan meningkatkan rekor pariwisata internasional.

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang dialami negara-negara akibat peningkatan angka kedatangan turis tidak selalu sama dengan peluang yang lebih baik untuk anak-anak. Nyatanya, sebaliknya, ada bukti kuat yang menunjukkan peningkatan tingkat perjalanan dan pariwisata mengakibatkan semakin banyaknya anak yang dieksploitasi dalam sektor seks komersial.

Penelitian terbaru juga mengidentifikasi bahwa pelaku seks lintas negara mengeksploitasi visa yang disederhanakan dan relatif mudahnya mencari pekerjaandi sekolah-sekolah di Asia Tenggara sebagai sarana untuk mengakses keberadaan anak-anak. Kurangnya pemeriksaan latar belakang dan kurangnya perlindungan anak kebijakan yang ada di bidang pendidikan di Asia Tenggara mengartikan bahwa pelaku seks transnasional pelaku jarang diperiksa oleh manajemen sekolahnya (Hawke and Raphael, 2016).

Dalam kasus perjalanan guru asing di Asia Tenggara yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, belakangan ditemukan beberapa pelaku memiliki *track record* hukuman sebelumnya akibat pelanggaran seks anak di negara asal mereka. Misalnya, di kasus seorang warga negara Inggris yang ditangkap setelah mengeksploitasi anak-anak secara seksual di sekolah-sekolah di Thailand, investigasi polisi menemukan bahwa dia memiliki catatan pelanggaran seks anak sebelumnya Inggris. Kurangnya pemeriksaan latar belakang pelaku, dikombinasikan dengan fakta bahwa dia merubah namanya beberapa kali. Dalam arti, penjahat ini sudah lolos berkali-kali untuk menjalankan aksinya (Thaiger, 2019).

Kehadiran internet dan teknologi komunikasi ini telah mengakibatkan diversifikasi peluang yang signifikan bagi pelaku seks anak untuk merencanakan perjalanan mereka,

untuk berkomunikasi secara anonim dengan pelaku seks anak lainnya, untuk mengakses, memproduksi dan menyebarkan gambar pelecehan seksual anak, dan untuk berpartisipasi dalam pertemuan seksual virtual dengan anak-anak tanpa meninggalkan rumah.

Terutama selama dekade terakhir, internet telah memfasilitasi perubahan pola eksploitasi seksual anak. Saat ini ada situs Internet yang menawarkan gambar pelecehan anak, streaming langsung pelecehan seksual anak, dan alat untuk mengatur wisata seks anak, serta akses ke informasi pada jaringan potensi korban pelecehan seksual anak. Internet memasok potensi dan mengulangi pelaku seks anak dengan kesempatan untuk mengatur perjalanan dan merencanakan kontak untuk mengakhiri penyalahgunaan langsung (Hawke and Raphael, 2016). Pelaku seks anak menyalahgunakan Internet untuk merawat korban mereka dan terhubung dengan calon fasilitator (misalnya keluarga atau anggota masyarakat) dari jauh.

Internet memberi pelaku ini menyembunyikan identitasnya sehingga mereka dapat menyembunyikan identitas aslinya dan mengakses materi eksploitasi seksual tanpa rasa takut akan terdeteksi.

Penelitian menunjukkan bahwa ada kurangnya kesadaran, di kalangan masyarakat umum, tentang risiko perawatan anak online dan pelecehan seksual anak di Asia Tenggara. Sebuah studi oleh World Vision International (Clement, 2014) yang dilakukan di Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam mengungkapkan bahwa orang tua memiliki pemahaman yang terbatas tentang apa yang merupakan pelecehan seksual terhadap anak. Studi tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar orang dewasa di negara-negara ini menganggap pelecehan seksual terhadap anak-anak hanya sebagai pemerkosaan penetrasi terhadap anak perempuan. dan bahwa tindakan pelecehan seksual lainnya termasuk

grooming umumnya tidak ditafsirkan sebagai pelecehan seksual terhadap anak-anak. Studi ini menyimpulkan bahwa sangat sedikit anak atau orang tua di wilayah tersebut yang menyadari ancaman online oleh pelaku seks anak.

2.2. Koalisi NGO

Hellen Yanacopulos mendefinisikan koalisi NGO sebagai sekumpulan organisasi yang disatukan dengan nilai-nilai dan tujuan yang sama. Down to Zero Alliance merupakan kolaborasi antara beberapa non-Governmental organization yaitu Terre des Hommes Netherlands (lead), End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), Free a Girl, ICCO-Cooperation dan Plan International Netherlands (Alpenidze, Klaassen, and Zuiderduijn 2020). Ke-5 NGO ini memiliki fokus atau tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak anak yang dieksploitasi khususnya dalam eksploitasi seksual komersial anak.

Terre des Hommes merupakan organisasi yang berjuang untuk hak-hak anak dan untuk mempromosikan pembangunan yang adil tanpa adanya diskriminasi antara ras, agama, politik, budaya atau gender. Lalu ada ECPAT yaitu sebuah organisasi yang berfokus untuk mengakhiri eksploitasi seksual komersial anak dan perdagangan anak, organisasi ini berpusat di Thailand. Free a Girl Foundation bertujuan untuk memberikan kebebasan, keadilan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang terjebak dalam eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. ICCO-Cooperation organisasi yang salah satu bidang utamanya yaitu mempromosikan hak-hak asasi manusia, keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial. Organisasi yang terakhir adalah Plan Internasional yang berfokus juga pada hak anak dan kesetaraan gender termasuk perlindungan anak dan pemberantasan perdagangan manusia.

Koalisi Dtz ini ditujukan untuk mengakhiri bentuk eksploitasi seksual terhadap

anak-anak dengan khususnya di wilayah Asia (India, Bangladesh, Indonesia, Filipina, Thailand) dan Amerika Latin (Brasil, Republik Dominika, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Peru). Aliansi ini mempunyai dana sebanyak 15 juta euro seperti yang dilampirkan pada laporan akhir. Hubungan kinerja ini dibangun selama 5 tahun terhitung dari 2016-2020 (de Hommel, 2019).

Koalisi ini menempatkan anak-anak rentan pada tujuan objektivitasnya. Mereka diberdayakan untuk mampu membela diri serta hak-haknya. Selain itu, Mereka juga dididik untuk terlibat dalam kampanye dan pengambilan keputusan guna meningkatkan kesadaran akan bentuk eksploitasi ini sehingga anak-anak tersebut mampu mengidentifikasi potensi situasi yang rumit dan eksploitatif. Selain itu, lingkungan yang aman dengan perlindungannya menjadi lokus pertahanan dalam rangka mencegah anak-anak menjadi korban dan kembali menjadi korban untuk kedua kalinya (de Hommel, 2019).

Adapun aktor-aktor yang dibidik untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga anak-anak tetap aman. Koalisi ini menempatkan pemerintah dan organisasi penegak hukum untuk menempatkan pencegahan eksploitasi seksual tersebut dalam rencana kebijakan mereka. Dan juga keberadaan pemimpin perusahaan dan bisnis seperti pariwisata, teknologi komunikasi, transportasi dan industri ekstraktif untuk secara aktif terlibat dalam perlindungan anak dari segala bentuk seksual komersial. Dua *stakeholder* ini menjadi kunci yang dirangkul bersama koalisi *Down to Zero*. (Son, 2016)

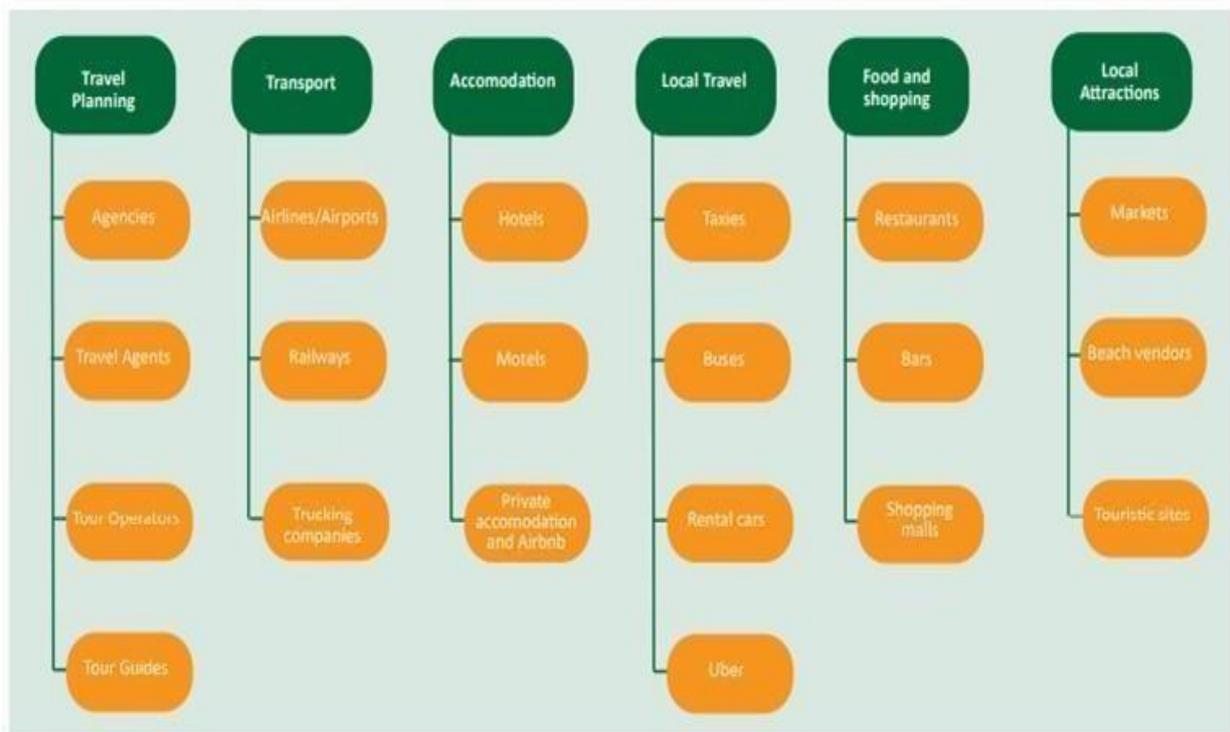
Dunia telah berubah, eksploitasi seksual terhadap anak semakin meningkat kompleks dan lazim pada pariwisata. Industri ini sekarang menjadi salah satu yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Koalisi terus mencari cara baru untuk terlibat dengan sektor swasta karena pelaku menyalahgunakan infrastruktur perjalanan dan pariwisata untuk mengeksploitasi anak secara seksual. Penjahat menggunakan maskapai

penerbangan, bus, kereta api, taksi dan transportasi pribadilainnya perusahaan, baik untuk bepergian sendiri maupun untuk transportasi korban. Hotel, motel, dan akomodasi lainnya digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap anak. Ancaman diperparah oleh Teknologi Informasi dan Komputer, misalnya ketika pelaku berbagi informasi tentang dimana menemukan potensi korban pada suatu tempat (hotel, bar, dan wisata lainnya) dan untuk menyimpan dan bertukar informasi.

Koalisi ini percaya bahwa industri pariwisata memegang peran penting dalam mengakhiri eksploitasi ini. Sehingga keputusan untuk menggandeng pemangku (*stakeholders*) menjadi pilihan yang tepat untuk membangun hubungan yang bersifat preventif. Tujuannya secara objektif adalah; untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen, Melibatkan pihak swasta dalam pencegahan, identifikasi dan eliminasi eksploitasi pada seluruh rantai dan jaringan, Untuk mengadvokasi dan menerapkan industri yang lebih baik, Untuk memanfaatkan sumber daya untuk mencapai misi. (Son, 2016)

Tabel ini menjelaskan bagaimana jejaring elemen industri pariwisata dengan segala perangkat sumber daya manusianya yang tersebar pada sub-sub divisi perusahaan tersebut dapat membantu koalisi untuk mengakhiri eksploitasi ini.

Diagram 2.3 Skema Kerjasama Down to Zero dengan sektor-sektor Privat



Sumber: (Ardaya et al. 2019)

BAB III
UPAYA KOALISI DOWN TO ZERO DALAM MENGATASI KASUS
EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TAHUN 2016-2020

3.1. Advokasi

Advokasi mengacu pada upaya atau tindakan berbicara atau bekerja atas nama suatu isu tertentu dengan tujuan mempengaruhi perubahan dalam kebijakan, praktik, atau opini publik. Pada dasarnya, advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, pemberian dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Serta upaya tersebut dibentuk untuk mempengaruhi kebijakan publik. (Yanacopulos, 2005)

Dalam konteks ini, advokasi dilakukan oleh aliansi *Down to Zero* membawa perubahan atau memperjuangkan masalah keadilan mengenai eksploitasi seksual komersial pada anak-anak di Thailand. Advokasi ini berupa jalinan kerjasama yang berupa pemberian pemahaman mengenai isu komersial anak sekaligus menjadi *watchdog* yang mengawasi dan mengantisipasi agenda ini akan terjadi. Kemunculan *Down to Zero* ini banyak membuka peluang-peluang baru untuk mengakhiri siklus eksploitasi seksual di Thailand. Inisiasi ini dilihat bagaimana DtZ membangun kedekatan dengan pemerintah Thailand yang kemudian melahirkan *Children Advocacy Centers* (CACs). Ini merupakan respon dalam menanggapi kebijakan untuk mengakhiri perdagangan anak dan kekerasan lainnya. CACs berfokus pada perlindungan korban (anak yang dieksploitasi) dengan mengurangi trauma, mendorong pemulihan psikis dan meningkatkan keadilan tuntutan pada pelaku.

"The services are designed for a central approach to victim support. Within a safe environment of the Child Advocacy Center, victims of trafficking can speak with forensically trained interviewers about the traumas they have experienced or testify against perpetrators." (FBI, 2016)

CACs mempunyai *headquarters* di Chiang Mai, Chonburi dan Pattaya. Pendekatan

yang digunakan dengan teknik fasilitasi. Seorang interview dilatih untuk pendampingan anak-anak sehingga CACs merupakan ‘rumah’ untuk ‘*vulnerable child*’. Untuk mencapai misi dan visi, mereka menerapkan 3 metodologi khusus yang dikenal 3R yaitu “*We Reach the vulnerable, We Rescue the vulnerable, We Restore the vulnerable*” (FBI, 2016).

“The Children’s Advocacy Center was established because we would like to assist the victims through the justice system without too many repetitions of services available for them. When they come here, they can come, they can play music, they can bake, they can do crafting, they can talk to our staff. We also teach children how to protect and save themselves from being abused. And teach them if something happened to them who they can report to. When they come here there’s police here that would build trust with them. Then they are willing, and there’s a social worker, so they’re willing to work with the victims with the law enforcement. And I think it creates a new view of the justice system when the police are more like child-friendly and victim-focused.” (FBI, 2016)

Kedekatan dengan pemerintah menjadi titik berangkat untuk melangsungkan kerjasama selanjutnya. *The Royal Thai Police* membasmi kejahatan ini dengan mendirikan TICAC di tahun 2016. Sejauh dibentuknya, TICAC sudah berhasil membekukan 280 kasus mengenai internet cyber-crime yang berfokus pada isu SEC. Bahkan di tahun 2018, sebanyak 58 anak-anak yang berhasil diamankan oleh TICAC. Keberhasilan ini berlanjut tahun 2019 sesaat momentum pemilihan umum, operasi TICAC berhasil menggagalkan geng kriminal yang sedang beraksi menculik anak-anak kecil. Investigasi ini berlangsung di Bangkok.

Selain itu, respon pemerintah terlihat dalam menanggapi operasi kejahatan yang berada dalam jangkauan internet dan telekomunikasi. Program ini sengaja dibentuk khusus pada wilayah sektoral telekomunikasi. Dengan itu, pemerintah meluncurkan program ThaiHotline untuk melaporkan kejadian-kejadian yang rentan sebagai langkah antisipatif untuk kasus yang terus berlanjut dan siap melayani 24 jam dan tersedia dalam 20 bahasa untuk semua anak-anak tanpa memandang latar belakang kebangsaannya. Langkah ini tidaklah lahir begitu saja melainkan dorongan dari Down to Zero program

setelah beberapa kali agenda pertemuan dengan kementerian pendidikan (Alpenidze, Klaassen, and Zuiderduijn,2020).

Selain itu, upaya dari *The Ministry Justice and Courts* untuk membantu korban dalam proses pidana dan ganti rugi penyintas. Penyintas diberikan layanan berupa dukungan rehabilitasi, hukum, tempat penampungan dan penyediaan pemulihan psikis. DtZ memperhatikan bahwa sebagian besar korban yang dipulangkan menjadi korban kembali. Maka jalan pendekatan dipilih dengan memotivasi keluarga mereka untuk mendukung reintegrasi anak-anak ke tahap protektif. Sebaliknya, ancaman intimidatif coba diutarakan oleh pelaku terhadap anak-anak yang diketahui lokasinya sehingga DtZ mencoba membantu dengan mengambil peran *shelter* yang berlokasi di Pattaya (Alpenidze, Klaassen, and Zuiderduijn, 2020).

Perkembangan positif dirasakan di *The Ministry Justice and Courts*, di mana Departemen Penyidikan Khusus (DSI) membentuk satuan tugas khusus (*task force*) Counter Crime Against Children pada 31 Januari 2017. Departemen Penyidikan Khusus juga terus mengembangkan database tersangka pelaku kejahatan dengan dukungan teknis dari koalisi DtZ untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ESKA dan mengadili pelaku tersebut. Setelah kegiatan lobi yang difasilitasi oleh mitra, Mahkamah Agung mengadakan seminar yudisial tentang “Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Masalah Eksploitasi Seksual Anak dalam Pariwisata” di Bangkok pada 12 Juli 2017. Dalam seminar tersebut, Presiden Mahkamah Agung meminta para hakim dari 9 wilayah untuk memastikan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak, termasuk kasus eksploitasi seksual online, ditangani dengan tepat. Setelah seminar, Rapat Umum tahunan yang diselenggarakan oleh Kehakiman Provinsi Udon Thani dan diketuai oleh penasihat khusus untuk HM Queen Silvia dari Swedia, menegaskan kembali perlunya memprioritaskan tindakan terhadap ESKA, khususnya eksploitasi seksual anak yang kerap terjadi secara online. Pada 2017,

kebijakan baru dan kelompok kerja pemerintah dibentuk. Untuk mengadvokasi pelaksanaan kebijakan baru tersebut dan memperkuat fungsi kelompok kerja ini (de Hommel, 2017).

Sejak 2018, DtZ terlibat menjadi tim khusus yang mengkaji undang-undang mengenai kejahatan seksual secara daring. Fenomena ini sudah dikaji dan diteliti Bersama DCY (*Departement Child and Youth*). Alhasil, ditemukanlah celah dimana pelaku kejahatan ini seringkali lolos dari jeratan hukum terlebih pasal-pasal yang mengatur secara jelas belum konsisten untuk menghukum kejahatan daring. Di tahun 2019, kebuntuan ini tercermin dengan adanya pemilihan umum. Bahkan hingga 2020 koalisi NGO ini berakhir, undang-undang tersebut masih berupa draft yang belum disahkan (de Hommel, 2019).

Advokasi yang dilakukan oleh DtZ tidak hanya ditujukan kepada pemerintah saja melainkan menargetkan pada anak-anak itu sendiri. Hal ini terlihat dengan DtZ mengadakan *children forum* yang berisi pada tahap-tahap preventif anak-anak untuk merespon dan mengantisipasi pada eksploitasi seksual komersial. Bentuk program ini dihadiri oleh perwakilan kelompok anak kecil dari setiap daerah-daerah rawan seperti Chiang Rai, Chiang Mai, Tak, Nakornchasi, Phuket dan Bangkok. Acara ini diadakan pada November 2018 yang dihadiri oleh *the National Legislative Assembly, the Department of Children and Youth Affairs, the Ministry of Justice, the Ministry of Education, the Royal Thai Police, and the Office of the Attorney General*.

Di tahun berikutnya, 2019 diadakan acara advokasi yang sama yaitu *Asian Children Summit* pada tanggal 26-30 November 2019 di Bangkok. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari anak-anak berlatar belakang etnis minoritas di Thailand Utara. Pertemuan ini didesain dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mewujudkan hak anak. Secara khusus, untuk mengumpulkan rekomendasi anak tentang realisasi hak guna membangun

kapasitas advokasi, untuk menyediakan tempat pertukaran budaya atas kontribusi anak dalam melakukan advokasi, untuk realisasi hak-haknya. Asian Children's Summit 2019 diikuti oleh 46 delegasi anak dari 21 negara dari Asia Tenggara (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam), East Asia (Jepang, Mongolia, dan Taiwan), dan Asia Selatan (Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka) (Child Rights Coalition Asia, 2020).

Program-program DtZ dinilai lebih merata pada beberapa daerah seperti Chiang Rai dan khususnya Pattaya. Pada tahun akhir-akhir koalisi DtZ ini, sebanyak 691 anak-anak dilatih dan diberikan pemberdayaan untuk mengetahui bentuk-bentuk *grooming*, *sexting*, dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya. Dari situ, program ini dibentuk untuk memberikan pelajaran pada anak-anak guna mengetahui lebih jauh bentuk-bentuk pencegahan dengan melaporkan situasi tersebut. Program ini juga menyediakan *shelter*, *health and educational services*, dan bantuan-bantuan legal (hukum).

Di daerah Chiang Rai pada 2019, anak-anak sebanyak 11 (5 laki-laki dan 6 perempuan) yang merupakan penyintas dari tindakan kriminal ini diberikan pelatihan berupa advokasi untuk lebih *aware* dan memperjuangkan hak-hak anak terkait keamanan dan kenyamanan anak-anak. Program ini juga menitikberatkan pada hal-hal kepemimpinan, *peer education*, dan advokasi. Di lain sisi, kerja sama program ini diadakan dengan ‘menggandeng’ NGO *Adventist Development and Relief Agency* (ADRA) (de Hommel, 2019).

Selanjutnya, advokasi DtZ menyasar sekolah-sekolah yang menjadi poros dan pilar keberadaan anak-anak. Pendidikan menjadi kunci dan mempunyai peran besar dalam membentuk kesadaran anak-anak. Sehingga kolaborasi ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan pada guru dan tenaga kependidikan khususnya pada sekolah-sekolah

yang berdomisili di Bangkok. Setelah sesi tersebut, beberapa guru didelegasikan untuk mengikuti The Bann Roummit School di Chiang Rai yang diselenggarakan oleh *Down to Zero* tentang OCSE (*Online Children Sexual Commercial*) dan perlindungan anak untuk 26 guru (31 Mei-1 Juni 18) (de Hommel, 2018).

Kesepakatan kolaborasi tersebut kemudian membuahkan hasil. Pihak sekolah membentuk komunitas “Creative Computer Club” pada 2018. Komunitas ini secara khusus mendedikasikan pada praktek-praktek teknologi untuk mengantisipasi disinformasi dan pengetahuan-pengetahuan yang secara konstruktif membentuk *willingness* (kesukarelaan) bujuk rayu untuk *Sexual Exploitation Commercial*. Sehingga di tahun berikutnya, beberapa guru secara sukarela mendedikasikan dirinya dengan menjadi *watchdog* untuk melindungi murid- muridnya dari tindakan-tindakan kriminal dan tidak manusiawi ini. Bahkan, kemajuan ini terlihat dari sekolah-sekolah yang memasukan aktivisme ini dalam kurikulum akademik sekolah (de Hommel, 2018).

Advokasi DtZ ini terus berkembang dan terus dilanjutkan upayanya untuk meningkatkan kesadaran dengan melatih anggota komunitas dan mengembangkan Child Members of Community Based Child Protection Mechanisms (CBCPM). (CBCPMs) merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat. CBCPMs adalah pendekatan perlindungan anak yang melibatkan partisipasi aktif anak-anak dalam upaya perlindungan dan pengembangan mereka. *Framework*, ini dikembangkan oleh Plan International yang merupakan salah satu koalisi DtZ, menempatkan anak-anak sebagai subjek aktif, bukan hanya objek dalam proses perlindungan. Mereka diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pemantauan, identifikasi, dan penanganan masalah perlindungan anak di komunitas Relawan CBCPM yang sudah dinilai ‘berhasil’ atau ‘mapan’ dipindahkan untuk mengawal masyarakat tanpa dukungan program selain sekolah. Tujuh belas guru di distrik Mae Wang provinsi Chiang Mai, 73

staf penitipan anak, dan 29 guru sekolah juga mendapat manfaat dari pelatihan tentang pedoman untuk mengidentifikasi SEC dan melindungi anak-anak. Bahkan program ini membantu mengorganisir protes di Mae Hong Son menyusul kasus SEC yang melibatkan pejabat LEA.

Sebagai NGO yang berbasis koalisi, DtZ memanfaatkan penelitian mutakhir dan data-data teknis yang didapatkan dari koalisinya tersebut mempunyai misi untuk menyadarkan sektor swasta dan meyakinkan perusahaan serta individu untuk mengambil tindakan. Selama bertahun-tahun, ECPAT yang salah satu koalisi NGO tersebut khususnya telah berhasil melibatkan sektor swasta dalam beberapa kampanye peningkatan kesadaran melawan eksploitasi ini (Ardaya et al, 2019).

Ada banyak alasan bagi sektor swasta untuk melindungi anak-anak. Koalisi ini telah membantu meyakinkan perusahaan-perusahaan pariwisata untuk hak-hak anak, menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak menimbulkan risiko bagi bisnis dan mengadopsi model bisnis yang berkelanjutan merupakan investasi strategis. Maka, DtZ menawarkan kerja sama dengan pendekatan CSR yang terfokus pada hak-hak anak. Untuk melibatkan pelaku sektor swasta (bisnis-bisnis) dalam pencegahan, identifikasi, dan penghapusan eksploitasi ini di seluruh rantai jaringan kejahatan.

Meskipun industri perjalanan dan pariwisata bukanlah penyebab eksploitasi ini, infrastrukturnya disalahgunakan untuk tujuan tersebut. Sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam menangani eksploitasi ini, ketika bisnis mengambil sikap yang jelas terhadap kejahatan dan ketika karyawan dilatih untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus yang dicurigai. Upaya harus menjangkau seluruh rantai dan jaringannya, artinya setiap entitas yang menerima uang yang berasal dari perjalanan dan pariwisata harus berpartisipasi. Rantai nilai mewakili total dari apa yang dibelanjakan platform online, saat menggunakan berbagai layanan dan produk selama perjalanan atau jasa inap mereka

(Ardaya et al. 2019).

Down to Zero menempatkan advokasinya pada 4 elemen yaitu pemerintah, masyarakat umum, sekolah, dan sektor-sektor bisnis privat. Advokasi tersebut kemudian menjadi satu stimulus mendorong perbaikan-perbaikan pada berbagai sektor berbentuk pemberdayaan, program-program antisipatif, dan distribusi pengetahuan khusus pada bentuk-bentuk eksploitasi seksual serta penanganannya. Selain itu, DtZ juga terlibat pada tim khusus yang mengkaji undang-undang mengenai kejahatan seksual secara daring. Pertumbuhan internet dan peningkatan penggunaan perangkat teknologi pribadi memicu kejahatan-kejahatan siber. (Reuters, 2019).

3.2. Lobbying

Lobbying adalah praktik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dengan tujuan mempengaruhi keputusan politik atau kebijakan publik yang menguntungkan atau mendukung kepentingan tertentu. Namun, bagi Yanacopulos, lobi merupakan proses yang jauh lebih bertarget. Keterampilan ini membutuhkan seni persuasi, pengetahuan dan keterampilan negosiasi. Yang membedakan, pelobi NGO biasanya mempunyai dasar untuk bergerak dan berkontribusi pada posisi keberpihakan suatu isu (Yanacopulos, 2005).

Adapun aktor-aktor yang dibidik untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga anak-anak tetap aman. Koalisi ini menempatkan pemerintah dan organisasi penegak hukum untuk menempatkan pencegahan eksploitasi seksual tersebut dalam rencana kebijakan mereka. Dan juga keberadaan pemimpin perusahaan dan bisnis seperti pariwisata, teknologi komunikasi, transportasi dan industri ekstraktif untuk secara aktif terlibat dalam perlindungan anak dari segala bentuk seksual komersial. Dua *stakeholder* ini menjadi kunci yang dirangkul bersama koalisi *Down to Zero*.

Untuk mencapai tujuannya, *Down to Zero* menerapkan strategi gerakannya yang

sudah dijelaskan pada *guidance for civil society organisations working on child protection* yang diterbitkan oleh *Down to Zero* pada Februari 2019:

- 1) Memungkinkan anak-anak untuk melindungi diri mereka dan membela hak-hak mereka dengan memperkuat sistem perlindungan anak dan menyiapkan yang baru jika belum ada. Kemudian memastikan bahwa anak-anak tersebut mengetahui bahwa layanan perlindungan ini ada dan dapat diakses. Selain itu, memberi tahu anak-anak tentang hak-hak mereka, dan risikonya terhadap eksploitasi seksual komersial. Terakhir, memberdayakan anak-anak dengan memberi mereka alat yang mereka butuhkan untuk membawa perubahan di lingkungan mereka dan untuk anak-anak lain.
- 2) Memberikan dukungan kepada komunitas untuk melindungi anak-anak dengan lebih baik melalui pendidikan kampanye, diskusi dengan tokoh masyarakat, dan pembentukan perlindungan anak.
- 3) Mendidik masyarakat umum tentang konsekuensi eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Membawa perbincangan dan permasalahan ini pada keluarga setempat untuk melawan rasa malu dan tabu mereka. Kemudian, menawarkan bantuan dengan melepaskan anak-anak dari situasi eksploitatif, dan mengatur tempat tinggal dan perawatan yang tepat bagi para korban.
- 4) Melobi otoritas lokal, membangun kapasitas dan memperjuangkan tuntutan pada para pelaku, sehingga pemerintah daerah, kepolisian dan sistem peradilan bergerak untuk memperbaiki kebijakan, undang-undang dan peraturan mereka.
- 5) Membangun atau memperkuat kerjasama dari sektor bisnis untuk perlindungan anak; melobi pelaku sektor swasta untuk mengembangkan

kode etik bekerja sama dengan organisasi terkait; bekerja sama dengan sejumlah industri, seperti sektor pariwisata, dengan mengembangkan kode etik yang harus diterapkan oleh perusahaan pariwisata lokal dan internasional untuk menawarkan perlindungan yang menjadi hak anak-anak.

Seiring meningkatnya eksploitasi komersial anak pada sektor pariwisata, Koalisi melakukan *lobbying* ke perusahaan-perusahaan terkait untuk bergabung *The Code*, singkatan dari “*The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism*”, adalah salah satu inisiasi yang dikembangkan oleh berbagai pemangku kepentingan, yang dikembangkan dan diterapkan di banyak pihak negara, dan sebagian didukung oleh program DtZ melalui kemitraannya dengan ECPAT.

The Code tersebut bertujuan untuk mengatasi eksploitasi seksual komersial anak dengan menciptakan industri perjalanan dan pariwisata yang sangat sadar terhadap isu ini. Dan terlatih dengan baik dapat mengenali dan mencegah potensi penyalahgunaan, eksploitasi, dan juga dengan membangun lingkungan tanpa toleransi pada wisatawan untuk memahami bahwa kejahatan ini tidak dapat diterima dan pelanggar akan dituntut.

Dengan menjadi anggota *The Code*, perusahaan mendapatkan akses penuh ke rangkaian alat dan layanan tanggung jawab sosial perusahaannya yang dapat membantu mereka melindungi masyarakat dari eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Jaringan mitra lokal *The Code* memberikan dukungan, panduan, contoh praktik terbaik, dan platform untuk membuatnya menjadi mudah dan seefektif mungkin. Artinya, hal ini merupakan pertukaran dan hubungan mutualistik yang ditawarkan oleh koalisi. Perusahaan dipermudah penyelesaian tanggung jawab CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan koalisi dapat memperpanjang tangannya dalam mewujudkan

pariwisata yang aman.

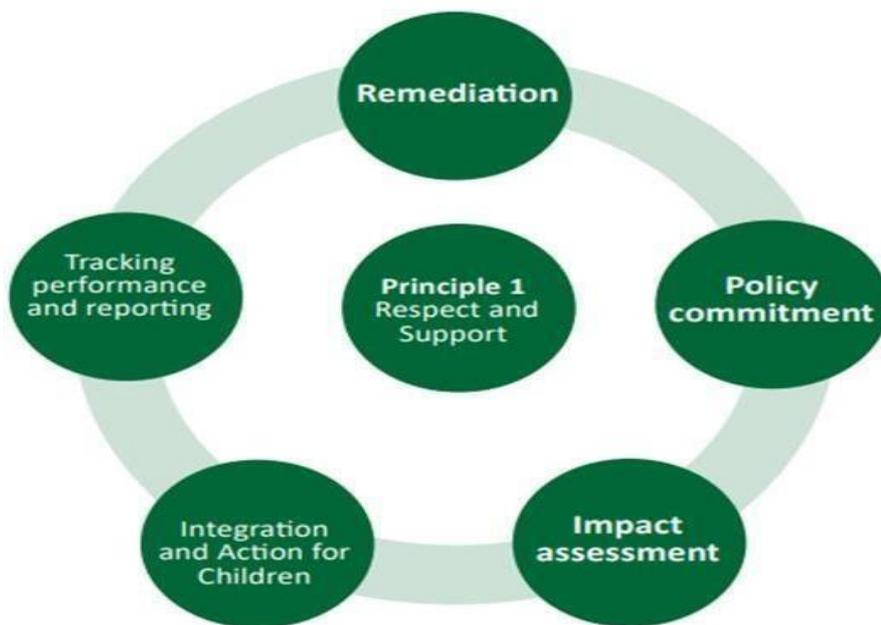
Di lain sisi, eksploitasi seksual terhadap anak-anak adalah masalah yang sulit, tetapi penting untuk diingat bahwa penerapan Kode Etik merupakan tindakan positif, yang menunjukkan komitmen keseluruhan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan sosial bisnis yang bertanggung jawab (*Corporate Social Responsibility*). Dengan mendaftar ke *The Code* ini, sebuah perusahaan secara aktif berkontribusi untuk melindungi anak-anak dari seksual komersial eksploitasi. Staf peserta akan merasa bangga terlibat dalam pekerjaan ini, serta bangga menjadi bagian darinya sebuah perusahaan yang mendedikasikan waktu dan uang untuk tujuan yang bermanfaat (Tepelus, 2019).

Meskipun tidak ada konsensus seputar definisinya, istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara umum mengacu pada perusahaan yang bertanggung jawab atas sosialnya dan dampak lingkungan. Di masa lalu, CSR sebagian besar dipahami sebagai alat pengaturan diri perusahaan, untuk menjadidiimplementasikan secara internal berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan sasaran. Sejak 1960-an, tekanan terus meningkat pada entitas perusahaan menjadi lebih transparan dan akuntabel dan melaporkan kegiatan mereka kepada publik.

Cakupan CSR juga telah diperluas, dengan manusia pemenuhan hak kini semakin menjadi bagian tanggung jawab sosial perusahaan. *International instrument* sekarang secara resmi mengenali dan mendefinisikan tanggung jawab sektor swasta terhadap hak asasi manusia. Penyelarasan hak asasi manusia dengan CSR ini telah terbuka cakrawala baru bagi Organisasi Masyarakat Sipil dan sebagaihasilnya, kemitraan antara bisnis dan organisasi berbasis hak sekarang lebih umum. Ini kolaborasi secara bertahap berevolusi dari amal donasi atau kontribusi keuangan, untuk mengintegrasikan CSR ke dalam operasi bisnis dalam bentuk bersama, strategis kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Saat perusahaan perjalanan atau pariwisata bergabung dengan *The Code*, mereka

berkomitmen untuk mengambil enam langkah penting untuk membantu melindungi anak-anak, yang kami sebut enam kriteria Kode Etik. Ini adalah: Menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap SEC, melatih karyawan tentang hakanak, pencegahan SEC, dan cara melaporkan kasus yang dicurigai, memberikan *zero tolerance* pada SEC, memberikan informasi kepada wisatawan tentang hak- hak anak, pencegahan SEC, dan cara melapor kasus yang dicurigai, mendukung, berkolaborasi, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pencegahan SEC, serta melaporkan setiap tahun tentang penerapan Kode Etik. Artinya kode ini mempunyai siklus yang dinamis dan saling berkesinambungan seperti pada figur dibawah ini.

Gambar 3.1 Kerjasama antara Private Sector dan Down to Zero Alliance



Source: (Tepelus 2019)

Dunia telah berubah, eksploitasi seksual terhadap anak semakin meningkat kompleks dan lazim pada pariwisata. Industri ini sekarang menjadi salah satu yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Koalisi terus mencari cara baru untuk terlibat dengan sektor swasta karena pelaku menyalahgunakan infrastruktur perjalanan dan pariwisata

untuk mengeksploitasi anak secara seksual. Penjahat menggunakan maskapai penerbangan, bus, kereta api, taksi dan transportasi pribadilainnya perusahaan, baik untuk bepergian sendiri maupun untuk transportasi korban. Hotel, motel, dan akomodasi lainnya digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap anak. Ancaman diperparah oleh Teknologi Informasi dan Komputer, misalnya ketika pelaku berbagi informasi tentang di mana menemukanpotensi korban pada suatu tempat (hotel, bar, dan wisata lainnya) dan untukmenyimpan dan bertukar informasi.

Di tingkat nasional, DtZ Thailand telah bekerja sama dengan bisnis internasional termasuk Facebook dan Google, serta salah satu dari tiga perusahaan IT teratas di Thailand, DTAC. Pada tahun 2020, bekerja dengan Facebook dan Google menyebabkan kedua perusahaan secara aktif menanggapi analisis programterhadap konten online yang ditandai mengandung risiko eksploitasi seksual dan menghapusnya sebagaimana mestinya. Bekerjasama dengan DTAC telah memimpin bersama dengan program penyelenggaraan YSILC (*Youth Service Innovation and Leadership Camp*) pada Oktober 2019 dan Mei-Juli 2020 bagi anak-anak untuk belajar bagaimana tetap aman saat online (Alpenidze, Klaassen, and Zuiderduijn, 2020).

Di tahun 2017, pertemuan-pertemuan dilakukan dengan Google Thailand untuk melobi mereka dalam bekerja sama proyek OSEC (*Online Sexual Exploitation Commercial*) di Thailand. Google merespon kasus ini dengan melatihempat puluh lima anggota LEA tentang penggunaan Google untuk tujuan investigasi OSEC. Namun, di tahun-tahun jumlah anggota industri yang bersedia menandatangani dan melaksanakan *The Code* masih terbatas. (annual report, 2017). Keberhasilan tersebut mendorong komitmen Google untuk menandatangani perjanjian dengan DtZ Thailand untuk *safe internet*, dan akan memfilter materi pelecehan seksual (CSAM), menerapkan tindakan

pengecehan di sekolah-sekolah di Februari 2020 (Alpenidze, Klaassen, and Zuiderduijn, 2020).

Selanjutnya, staf program yang terlibat dengan WTD (We Think Digital), sebuah project diluncurkan pada November 2019 untuk mengembangkan *digital citizenship* di Thailand. Lalu, bekerjasama dengan *Thailand Webmaster Association* (TWA) mendorong peningkatan kesadaran akan kejahatan ini pada sembilan perusahaan berbasis *online content creator* dan pada Mei 2019, TWA mengadopsi pedoman kebijakan perlindungan anak, pedoman anti cyberbullying, dan pedoman situs ramah anak (*Child Protection Policy, guideline Anti Cyberbullying, guideline Child Friendly Online guideline*) (de Hommel, 2018) untuk meningkatkan kesadaran di antara anggota. Pada Mei 2020, Tik Tok dan Joylada juga menghubungi program tersebut untuk membahas bagaimana menghadapi isu ini dan mendorong internet yang ramah untuk para penggunanya (Alpenidze, Klaassen, and Zuiderduijn, 2020).

3.3. Kampanye

Kampanye membutuhkan pesan tujuan yang jelas dan sederhana. Tujuannya adalah untuk memobilisasi pendukung dengan menggunakan media untuk menekan pembuat keputusan. Pada posisi ini isu mengenai eksploitasi seksual anak menjadi apa yang disebut oleh Yanacopulos (2005) sebagai *single- issue network* yang menyatukan koalisi untuk melakukan kampanye dan Dalam melakukan kampanye ini memiliki target yang lebih luas agar bisa menciptakan atau meningkatkan dukungan dari public yang lebih luas. (Yanacopulos, 2005)

Sebanyak 1.377 anggota komunitas dari 17 komunitas berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kesadaran terkait kasus ini. Peningkatan kesadaran dilakukan dengan mengintegrasikan pesan-pesan ini menjadi bagian dari acara yang lebih besar, seperti pada *the Akha Swing Community Festival*. Meskipun ada kegiatan peningkatan kesadaran,

jumlah kasus ESKA yang dilaporkan kepada pihak berwenang oleh anggota masyarakat tetap rendah. Anggota masyarakat enggan melapor dan mengajukan pengaduan bahkan lebih memilih penyelesaian kasus tanpa keterlibatan aparat penegak hukum. Korupsi di kalangan pejabat pemerintah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kepercayaan antara anggota masyarakat dan pejabat pemerintah daerah (de Hommel, 2017).

Di lain sisi, sekolah-sekolah meminta dukungan dari koalisi DtZ untuk menetapkan standar dan prosedur dalam menangani dan menanggapi secara tepat kasus eksploitasi yang dilaporkan. Minat dan komitmen ditunjukkan oleh warga masyarakat, khususnya para guru, untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan ESKA di komunitasnya. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi 'toleransi' dan anggapan lumrah terhadap kejahatan. Bagaimanapun, ini adalah proses jangka panjang dan pencapaiannya pun masih dibatasi pada tahun 2017. Program ini membantu mengorganisir protes di Mae Hong yang menyuarakan kasus eksploitasi anak yang melibatkan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang ESKA dan mengurangi toleransi dan anggapan lumrah yang masih dominan di wilayah Mae Hong Son dan sekitarnya. Namun, langkah ini kemudian mendapatkan respon rendah pada liputan media (de Hommel, 2017).

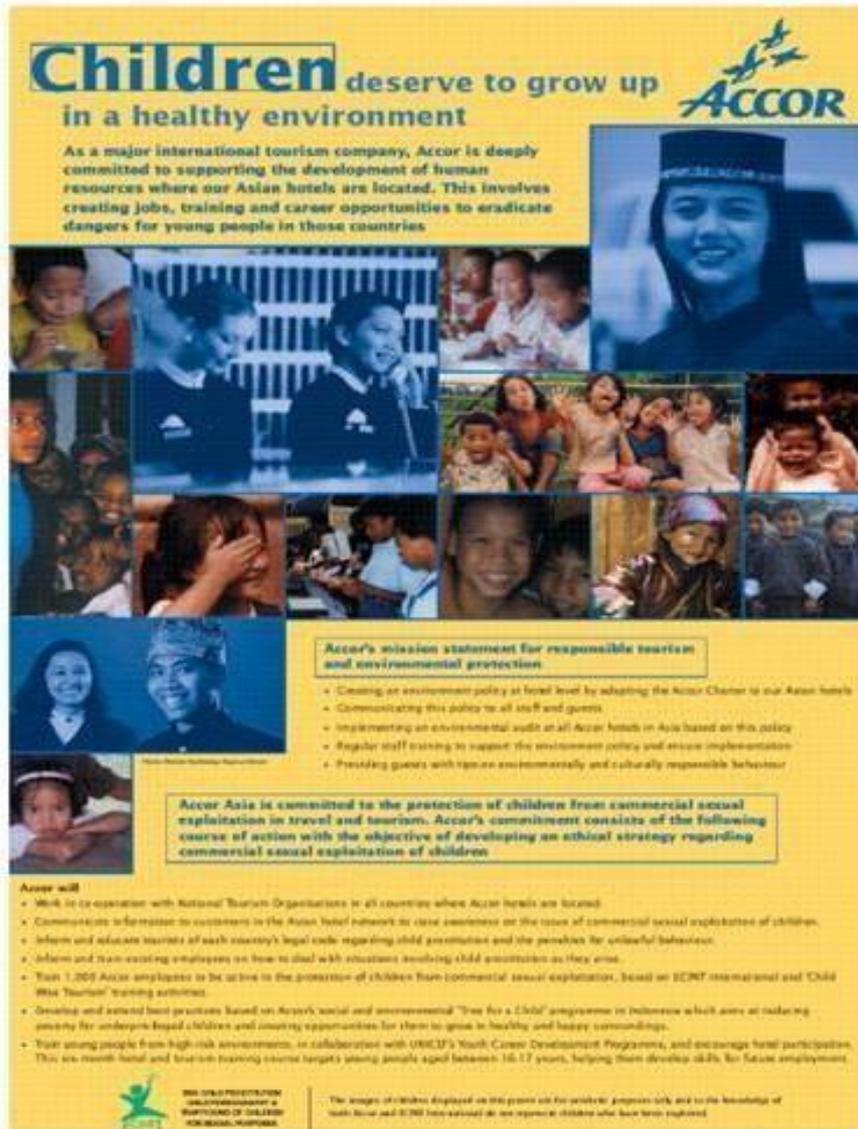
Pada tahun 2018, lebih dari 100 anak yang dilatih untuk mengangkat isu ESKA di antara teman sebayanya melakukan inisiatif peningkatan kesadaran di sekolah atau komunitas mereka. Misalnya, para pemimpin pemuda dari Wattanaseree Foundation yang sangat menyadari ancaman yang dihadapi anak-anak melalui media online, mengembangkan sebuah proyek kecil yang disebut "*Short Film Campaign to End Child Social Exploitation*". Program ini dilakukan oleh anak-anak untuk menyebarkan kesadaran melalui basis pengetahuan mereka dan serangkaian keterampilan kreatif

seperti kemampuan menulis, kemampuan mendongeng secara visual (*visual storytelling*), dan keterampilan sosial (*social ability*) untuk menceritakan kisah tentang bagaimana anak-anak dapat bekerja untuk mencegah tindak kejahatan ini (de Hommel 2018). Begitupun, 2019-2020, 20 peserta Young Safe Internet Leader Camp (YSILC) melaksanakan kampanye tentang cara tetap aman saat online, sementara 500 siswa secara aktif terlibat kegiatan pendidikan dalam kamp dunia maya (Alpenidze, Klaassen, and Zuiderduijn, 2020).

Di lain sisi, perkembangan ekonomi menunjukkan adanya hubungan antara pariwisata dan eksploitasi seksual anak-anak yang meningkat. Kerja sama yang sudah dilakukan bersama sektor-sektor bisnis pariwisata dan penginapan berhasil berkolaborasi dengan menerapkan '*Code of Conduct against Commercial Sexual Exploitation in Travel and Tourism*' sebagai pedoman dalam mengantisipasi sekaligus menjadi *watchdog* selama bisnis ini beroperasi. Hubungan ini berhasil membukakan jalan untuk meningkatkan kesadaran bersama dengan menyelipkan pesan-pesan kampanye yang berupa simbol dan pesan mengenai kejahatan ini. Beberapa produk kampanye ini ditempel di brosur-brosur, hotel, restoran, dan tempat-tempat strategis untuk memberikan *alarm-set* adanya operasi kriminal tersebut. Beberapa poster tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 3.2 Poster berupa Himbauan yang disertakan pada Beberapa Brosur, dan Media Komunikasi

 <p>Enjoy Your Holiday AND Help Us Protect Our Children</p>	<h3>Protect Our Children from Sexual Exploitation</h3> <p>Our children</p> <p>Just as growing trees need gentle care, water and fertilizer to become large, healthy trees that bear delicious fruit or beautiful blossoms in the future, so too do the children of Thailand to become a generation that brings pride and success to the country in the future.</p> <p>To us here in Thailand, spoiling the future of any child by forcing them into child labor or to provide sexual favors is completely unacceptable behaviour. We take a strict stand against child sexual exploitation because it goes against the very morals of our people and it against the law in Thailand.</p>
 <p>Enjoy Your Holiday AND Help Us Protect Our Children</p> <p>A single phone call or an e-mail to the authorities nationwide can help prevent the worst abuse of children in travel.</p> <p>• Thailand - Tourist Assistant Centre E-mail: tourist@tad.or.th</p> <p>• ICEJ Thailand E-mail: icej@icej.or.th, icej@icej.or.th</p> <p>• Thai Police Tel: 1-191 (toll free), Tel: 1-190 (toll free) E-mail: 191@police.go.th, 190@police.go.th</p>	 <p>Join hands in protecting our children from commercial sexual exploitation in Tourism</p>
<p>Enjoy Your Holiday AND Help Us Protect Our Children</p> <p>Thailand: A haven for tourists</p> <p>Thailand has many tourist attractions, complemented by a great wealth of natural beauty, in addition to a rich culture that adds to the country's distinctive way of life. With a wide variety of travel and recreational activities to cater to a wide tourist market, the country's tourist offerings include long-stay programmes to promote good health, eco-adventures to encourage the appreciation of nature, as well as various kinds of sports packages.</p> <p>It is the country's unique cultural heritage and wide variety of tourist packages available to tourists that have inspired the government to see the country away from its old associations with child sex tourism, and into a future that focuses on the kingdom's rich natural heritage.</p>	<p>Help us create a bright future for our children. Allow them to have a happy childhood by joining us in the fight against child prostitution, child pornography and the trafficking of children for sexual purposes.</p> <p>To help us in our mission, report any incident (no matter how small) to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Tourist Police: 1191 • Tourist Assistant Centre: Email: tourist@tad.or.th • FACE: 01-267-2111; Email: face@face.or.th, face@face.or.th • ICEJ Thailand: Tel: 02-210-3885; Email: icej@icej.or.th <p>Report</p> <ul style="list-style-type: none"> • Your local police as soon as you return home • Your nearest ICEJ office <p>Details at: www.icej.or.th</p> 



Source : (Tepelus 2019)

Pada tahun 2018 langkah-langkah besar setelah diambil untuk mengoperasionalkan strategi komunikasi DtZ. Sebuah rencana kerja yang konkrit telah disepakati, termasuk program pembuatan karya fotografi dan video tentang program DtZ, lalu MoU disetujui oleh majalah “Vrouw” untuk mengirimkan konten dan artikel yang ditulis oleh jurnalis

majalah tersebut tentang program koalisi. Wawancara pertama diadakan dengan Judith Flick, manajer program, untuk publikasi pada tahun 2019.

Sebagai bagian dari rencana kerja adalah mengadakan pameran foto – dengan judul "*this is me*" – pameran ini menawarkan perspektif artistik pada apa yang sudah dilakukan melalui gambar, narasi cerita penyintas dan anak-anakberisiko. Karya-karya tersebut dibuat fotografer Marieke van der Velden yang mengambil foto-foto tersebut secara langsung di tempat penampungan DtZ di Thailand. Kemudian, karya-karya tersebut dipamerkan di *Humanity House* di Den Haag, dan diluncurkan di hadapan perwakilan darisemua anggota aliansi *Down to Zero* dan MoFA. Foto-foto itu juga diterbitkan di *De Volkskrant* dan *The Guardian*. Perlu digaris bawahi bahwa dua media penting tersebut memiliki jumlah audiens dan khalayak yang banyak di seluruh belahan dunia (de Hommel, 2018).

Van der Velden, dalam semua karyanya, didorong oleh rasa kuat akan kebutuhan mengenai kesetaraan. Dia ingin percaya bahwa program ini akan membuat seluruh pelaku untuk berpikir dua kali tentang apa yang mereka lakukan, tetapi secara praktek pengambilan menggunakan metode 'halas' dan memposisikan anak-anak sebagai subjek untuk menghindari pemaksaan dan kesan yang "kasar". Namun yang penting dalam foto-foto itu adalah memposisikan anak-anak seperti dalam kehidupan nyata, adalah bahwa anak-anak itu harus dihormati (de Hommel, 2018).

Gambar 3.3 Tampak Hasil Fotografi Van Der Velden di Tahun 2018



Source : (The Guardian, 2019)

Anak-anak dalam karya-karya Velden merupakan penyintas kejahatan eksploitasi seksual. Beberapa narasi ini diangkat dan ditulis oleh jurnalis majalah *Vrouw*. Wawancara diambil dengan sangat hati-hati tanpa sadar dan tanpa sedikit untuk menguras emosi penyintas akibat berusaha menyigap masa lalunya yang kelam. Teknik-teknik seperti ini sudah dikuasai oleh fotografer profesional untuk satu karyanya yang mempunyai ‘suara’.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Thailand merupakan negara dengan tingkat perdagangan manusia yang relatif cukup tinggi terutama semenjak dibukanya sektor pariwisata sejak tahun 1980 an, meskipun memberikan sumbangsih peningkatan GDP. Justru sebaliknya,poros ekonomi ini menjadi stimulus pada eksploitasi seksual komersial anak-anak yang menjadikanya objek seksual, tak sedikit wisatawan asing datang dengan tujuan ini. Bentuk kejahatan inipun variative seperti prostitusi, pornografi, perdagangan anak, *grooming*, dan lain-lain.

Beberapa NGO melihat kausa ini sebagai ancaman besar pada masa depan anak-anak sehingga mereka disatukan oleh isu ini untuk membentuk sebuah aliansiyang disebut *Down to Zero*. Aliansi tersebut mencakup beberapa NGO yaitu *Terre des Hommes Netherland* (LEAD), End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Secual Purposes (ECPAT), Free a Girl, ICCO- Cooperation, dan Plan International Netherlands. Durasi kerjasama terjalin selama 5 tahun terhitung dari 2016- 2020 dengan dana sejumlah 15 juta Euro.

Fenomena ini semakin diperparah dengan dukungan profielasi internet dan jaringan telekomunikasi sehingga menempatkan Thailand sebagai negara peringkatke 6 dari 15 negara yang memberi gambar pelecehan seksual anak di tahun 2019. Pasalnya, hal-hal seperti ini menjadi stereotip khusus yang oleh media justru disebarluaskan karena poros hukum undang-undang perlindungan anak tidak menjustifikasi hal tersebut.

Sehingga dalam menjalankan tugasnya agar bisa mengatasi kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand yang terus meluas ini, koalisi DtZ secara garis besar melakukan 3 strategi utama dengan menysasar semua aspek yang berpotensi bisa terjadinya ESKA, ke-3 strategi tersebut yaitu advokasi, lobi dan kampanye.

Pertama, *Down to Zero* menempatkan advokasinya pada 4 elemen yaitu pemerintah, masyarakat umum, sekolah, dan sektor-sektor bisnis privat. Beberapa advokasi ini secara garis besar berbentuk: pemberdayaan, program-program yang sifatnya preventif dan antisipatif, pemberian pengetahuan-pengetahuan, dan mendorong perubahan-perubahan pada berbagai sektor. Salah satunya dengan melakukan advokasi kepada sebanyak 691 anak-anak dilatih dan diberikan pemberdayaan untuk mengetahui bentuk-bentuk *grooming*, *sexting*, dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya. Dari situ, program ini dibentuk untuk memberikan pelajaran pada anak-anak guna mengetahui lebih jauh bentuk-bentuk pencegahan dengan melaporkan situasi tersebut. Selain itu, DtZ juga terlibat pada tim khusus yang mengkaji undang-undang mengenai kejahatan seksual secara daring.

Kedua, aktivitas lobby yang dilakukan DtZ dengan menerapkan politik klasik dimana menempatkan dirinya untuk bekerja sama dalam melakukan perubahan. Secara khusus menasar pada jalinan kerjasama antara koalisi dengan *stakeholder* perusahaan-perusahaan privat. Dengan pertukaran yang sifatnya mutualistik (saling menguntungkan) pada sisi CSR (Corporate Social Responsibility). Hal ini memberikan pelatihan, penanganan, dan pemberdayaan pada karyawan-karyawan mereka untuk mengantisipasi kejahatan ini terjadi. Selain itu, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Tiktok, *Online Content Creator* untuk menjadi partner dalam penghapusan konten-konten *abusive* yang justru memberikan keuntungan bagi para pelaku kejahatan sehingga mendorong terbentuknya program yang disebut WTD *We thinkDigital*.

Ketiga, Kampanye yang dilakukan DtZ dengan melakukan aksi protes dan juga penggunaan media dalam memobilisasi pendukung. Kampanye awal DtZ ini dengan menggelar kampanye pada event besar di Thailand yang disebut *the Akha Swing*

Community Festival dengan mengintegrasikan pesan-pesan terselubung pada isu ini. Lalu, menggelar “*Short Film Campaign to End Child Social Exploitation*” yang membantu menularkan kesadaran sesama anak-anak sebayanya bahkan gurunya. Dorongan kampanye ini berlanjut yang bekerja sama dengan The Code untuk memberikan poster isu ini pada aktivitas komunikasi mereka bagi wisatawan-wisatawan. Dan lain hal, Kerjasama dengan majalah *Vrouw* yang membuat karya-karya fotografi untuk mewartakan pesan pada khalayak lebih luas seperti *the Guardian*. Karya ini berhasil dipamerkan pada petinggi-petinggi negara.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini merupakan bentuk analisis dan identifikasi pada upaya *Down to Zero Alliance* yang terjalin 2016-2020. Perlu diketahui bahwa aliansi ini sebenarnya mempunyai *scope* penanganan kasus ini pada beberapa wilayah yaitu Amerika Latin dan Asia yang kemudian oleh Peneliti difokuskan pada negara Thailand. Maka rekomendasi penelitian ini disarankan untuk meneliti negara-negara lain yang juga menjadi target oleh DtZ seperti Kolombia, Pakistan, India, Brazil, dan Canada. Tentu, penelitian tersebut akan menjadi lebih jelas untuk mengukur upaya *Down to Zero* pada isu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpenidze, Irma, Hadewijch Klaassen, and Mike Zuiderduijn. 2020. "Report Down to Zero Programme End Term Evaluation 2020 Final Report." MDF Training & Consultancy BV HNK Horapark, Bennekomseweg 41 6717 LL Ede The Netherlands: Down to Zero Alliance.
- Ardaya, Soledad, Aude Diepenhorst, Judith Flick, Willeke Kempes, Gabriella Kuhn, and Theo Noten. 2019. *Effective Ways of Working With The Private Sector: Background Paper and Guidance for Civil Society Organizations*. Copyrights ECPAT International jointly with the Down to Zero Alliance. https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/08/EffectiveWayofWorking-with-PrivateSector_ENG.pdf.
- Baker, Simon. 2005. "The Changing Situation of Child Prostitution in Northern Thailand: A Study of Changwat Chiang Rai."
- Boerwinkle, Candy Sue, Anna Humphreys, Shannon Connolly, and Colin Guiley. n.d. "Rogue Journal of Undergraduate Research Issue 3 Summer 2015."
- Child Rights Coalition Asia. (2020). The 2019 Asian Children's Summit. *Child Rights Coalition Asia*. Bangkok. Retrieved 2023, from <https://www.crcasia.org/2019-asian-childrens-summit/>.
- Clement, William. 2014. "The Vulnerability Report : Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-Region." Australia: World Vision International. <https://www.wvi.org/sites/default/files/WV%20Trafficking%20Report%20P1.pdf>.
- DtZ Private Sector Working group. 2019. "Effective Ways to Engage the Private Sector: Guidance for Civil Society Organizations Working on Child Protection." Down to Zero Alliance. www.downtozeroplatform.com.
- Fartiannur, Yuliatma. 2018. "KEPENTINGAN THAILAND DALAM MELAKUKAN GASTRODIPLOMACY MELALUI KITCHEN OF THE WORLD" 6.
- FBI – Federal Bureau of Investigation. 2016. *Boom, Child Advocacy Center Director, Chiang Mai*. <https://www.youtube.com/watch?v=Co6A-dsF618>.
- Hawke, Angela, and Alison Raphael. 2016. "GLOBAL STUDY ON SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN TRAVEL AND TOURISM." https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-9926-2016015.
- Hommel, Ronald de. 2017. "Annual Report 2017 Narrative Report of The Down to Zero Alliance." Down to Zero Alliance.
- . 2018. "Annual Report 2018 Narrative Report of The Down to Zero Alliance." Down to Zero Alliance.
- . 2019. "Annual Report 2019 Narrative Report of The Down to Zero Alliance." Down to Zero Alliance.
- INHOPE. 2019. "Annual Report 2019." Bos en Lommerplein 270-300 1055 RW Amsterdam, The Netherlands: INHOPE Association. https://www.inhope.org/media/pages/the-facts/download-our-whitepapers/e09e3a0238-1603115653/2020.10.19_ih_annualreport_digital.pdf.
- Lau, Carmen. 2008. "Child Prostitution in Thailand." *Journal of Child Health Care* 12 (2): 144–55. <https://doi.org/10.1177/1367493508090172>.

- Lestari, Eka Mulyani, and I Made Anom Wiranata. 2015. "PERAN ECPAT DALAM MENANGANI CSEC OLEH WISATAWAN ASING DI THAILAND."
- McGeough, S. (2022). Human Trafficking in Thailand. The Exodus Road. Retrieved 2023, from <https://theexodusroad.com/human-trafficking-in-thailand/>
- Naebklang, Manida. 2015. "SITUATIONAL ANALYSIS OF THE COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN THAILAND." https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-9926-2015006.
- Peltier, D. (2016). *5 Charts Showing the Rise in International Arrivals to Asia-Pacific Destinations*. Skift.
- Rafferty, Yvonne. 2007. "Children for Sale: Child Trafficking in Southeast Asia." *Child Abuse Review* 16 (6): 401–22. <https://doi.org/10.1002/car.1009>.
- Reuters. 2019. "Thai Police Say Cybersex Traffickers Targeting Boys from Wealthy Families," June 17, 2019, sec. APAC. <https://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking-sexcrimes-idUSKCN1TI1QA>.
- Son, C. V. (2016). Down to Zero Fighting Commercial Sexual Exploitation of Children. Defence for Children..
- Tepelus, Camelia. 2019. "Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism." Thailand: ECPATThailand and World Tourism Organization.
- Thaiger. 2019. "Former British Bangkok Teacher Jailed over Aiding and Abetting Child Abuse|Thaiger." 2019. <https://thethaiger.com/news/bangkok/former-british-bangkok-teacher-jailed-over-aiding-and-abetting-child-abuse>.
- The Guardian. (2019). The Thai Children Putting a brave Face on the Horror of Sexual Abuse. *The Guardian*. Retrieved July 2023, from <https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/apr/20/thai-children-putting-a-brave-face-on-sexual-abuse>.
- Vereinte Nationen, ed. 2018. *Trafficking in Persons in the Context of Armed Conflict*. Global Report on Trafficking in Persons, 4th (2018). New York: United Nations.
- Yanacopulos - 2005 – "The Strategies That Bind NGO Coalitions and Their Influence".